

# DKI Kurangi 20 Persen Sampah

JAKARTA — Persoalan sampah memang seolah tak ada habisnya, tetapi bukan berarti harus patah semangat mengurusnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah berusaha mengurangi kota dari tumpukan sampah. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, target pengurangan sampah di Ibu Kota kian ditajamkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, Ibu Kota menargetkan pengurangan sampah hingga 20 persen tahun ini. "Rata-rata jumlah sampah yang diangkut ke TPA Bantargebang, Bekasi, meningkat setiap tahunnya," ujar Isnawa dalam uji publik rancangan peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta di gedung Satria Tower, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/2).

Isnawa menjabarkan, berdasarkan data dari DLH DKI Jakarta tercatat bahwa pada 2017 sampah yang diangkut ke Bantargebang mencapai 6.875 ton per hari. Jumlah tersebut meningkat pada 2018 menjadi 7.452 ton per harinya. Sementara itu, dari 2,5 ton sampah dari Jakarta per tahunnya, 357 ribu ton merupakan plastik. Dari jumlah tersebut, 178 ribu ton diketahui membebani TPA di Jakarta.

Data juga menyebutkan konsumsi kantong plastik masyarakat Jakarta mencapai 1.900 hingga 2.400 ton per tahunnya. Artinya, setiap hari masyarakat Jakarta menggunakan 240 juta-300 juta lembar kantong plastik. Dari hasil studi untuk 100 tempat pembuangan sementara (TPS) Jakarta ditemukan bahwa plastik menjadi komposisi sampah dengan jumlah mencapai 9 persen dari sampah yang ada.

Isnawa menegaskan, Pemprov DKI Jakarta kini tengah mempertegas peraturan penggunaan kantong plastik belanja. Jenis kantong plastik terlarang memiliki pegangan tangan dan untuk sekali pakai saja. Saat ini, rancangan peraturan gubernur DKI Jakarta terkait kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan tengah diupayakan. Rancangan tersebut akan mengatur pelarangan penggunaan sampah plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.

"Pihak pengelola atau pemilik dilarang menyediakan kantong plastik," kata Isnawa. Sebagai gantinya, kantong belanja guna ulang harus tersedia. Sanksi akan berlaku apabila terdapat pelaku usaha yang melanggar. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis hingga denda atau uang paksa. Jumlah denda yang dikenakan diperkirakan sekitar Rp 5 juta sampai Rp 25 juta. Hukuman terberat bahkan bisa menjerat pelaku usaha mendapat pembekuan dan pencabutan izin usaha.

DLH DKI Jakarta juga berencana mengelola sampah, seperti pembuatan kompos, pengolahan sampah pasar, serta gerakan menggunakan botol minum ramah lingkungan. Terkait pembuatan kompos, pihaknya melirik sampah pasar yang tidak dikelola dengan baik, seperti sampah di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, yang mencapai 80 ton per hari. "Padahal, banyak sampah sisa sayur yang bisa dijadikan kompos, tetapi dibuang begitu saja," kata Isnawa.

Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan 30 persen pengurangan sampah serta 70 persen penanganan sampah pada 2025. Kasubdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK Ujang Solihin Sidik mengatakan, permasalahan sampah sudah ditangani secara nasional dan global.

"Mencegah sampah selalu menjadi lebih baik," kata Ujang. ■ agata eta andayani ed: nora azizah